

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Sri Susanti¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah peranan pemerintah desa meliputi animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, serta mengorganisasi dan faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu library research dan field work research. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju yang dilihat dari aspek animasi sosial yaitu motivasi dalam bentuk penghargaan tidak pernah diberikan kepada petani yang hasil pertaniannya meningkat. Mediasi dan negosiasi yaitu pemerintah desa dapat bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan pembangunan pertanian. Pemberi dukungan yaitu pemerintah desa memberikan dalam bentuk pembuatan gorong-gorong jalan usaha tani dan pengerasan jalan usaha tani. Fasilitasi kelompok yaitu pemerintah desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan pertanian. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan yaitu pemerintah desa memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil pertanian. Serta mengorganisasi yaitu pemerintah desa melakukan perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan pertanian. Adapun faktor pendukung yaitu kondisi atau lingkungan yang baik dan faktor penghambat yaitu kurangnya keterampilan masyarakat.

Sehingga disimpulkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju masih kurang berhasil, khususnya pada aspek animasi sosial maupun pemanfaatan sumber daya dan keterampilan.

Kata Kunci : *Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat.*

¹Mahasiswa Program SI Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Srisusanti1302@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Melihat hal tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 yang disebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah mengandung arti kebebasan berkreasi membangun daerah yang terbuka lebar bagi daerah. Akan tetapi, terdapat juga setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi.

Salah satu sasaran pokok pembangunan Desa ialah memberantas atau setidaknya mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Pembangunan desa harus melibatkan sebagian besar penduduk, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kiranya cukup disadari bahwa tidak jarang terjadi, hasil pembangunan desa hanya dinikmati oleh sekelompok elite desa atau bahkan oleh orang-orang di luar lingkungan desa (Suwondo, 2008:73).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Dimana kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah desa dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak

pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

Berdasarkan studi pendahuluan, Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang masih kurang peranannya dalam memberdayakan masyarakat, hal ini diketahui dari hasil pra penelitian dengan wawancara pada warga desa yang ada dilokasi penelitian yang menyatakan bahwa kurangnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui program pembangunan pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat Desa Sukamaju, yaitu pendapatan para petani yang masih rendah sehingga penduduk desa cenderung masih mengalami kemiskinan. Dimana semakin sempitnya rata-rata kepemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja di Desa Sukamaju serta kurangnya penyuluhan kepada kelompok tani dan koperasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang mengakibatkan masih kurangnya hasil pertanian dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Tenggarong Seberang. Padahal diharapkan pemerintah Desa Sukamaju dapat melakukan pemberdayaan masyarakat terpadu yang tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk dan memperkuat kemandirian.

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis ingin mengetahui **“Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang”**.

Rumusan masalah

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pemberdayaan masyarakat dan sebagai bahan masukan bagi fakultas dan menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah Desa Sukamaju dapat menjadi masukan dalam memberdayakan masyarakat, serta bermanfaat sebagai

pedoman dalam mengevaluasi program untuk dapat meningkatkan kinerja di kemudian hari.

KERANGKA DASAR TEORI

Peranan

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004:33).

Pemerintah Desa

Adapun pengertian pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 3 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu interaksi antar warga-warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009:115-118).

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 12 disebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan masyarakat menurut Soedijanto (2011:105-106) memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu.

Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.

2. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
3. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Hadisapoetro (2008:111) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
2. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.
4. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitra usaha.
5. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
7. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
8. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
9. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kartasasmita (2005:162) pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga pendekatan meliputi :

1. Pendekatan Mikro
Membimbing atau melatih penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. Pendekatan Mezzo
Agar penerima manfaat memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Pendekatan Makro

Penerima manfaat memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Priyono (2006:170) terdapat strategi pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Pengembangan sumberdaya manusia.
2. Pengembangan kelembagaan kelompok.
3. Pemupukan modal masyarakat (swasta).
4. Pengembangan usaha produktif.
5. Penyediaan informasi tepat guna.

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Sumadyo (2001) yang dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2012:113) merumuskan tiga bentuk pemberdayaan masyarakat yang disebut tri bina yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

Peranan Petugas Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ife yang dikutip oleh Rukminto (2008:17) ada beberapa peran yang dapat dilakukan petugas pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Animasi sosial
2. Mediasi dan negoisasi
3. Pemberi dukungan
4. Fasilitasi kelompok
5. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan
6. Mengorganisasi

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional pada penelitian ini yaitu peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah suatu tindakan pemerintah desa dalam memperkuat masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang diarahkan melalui animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan serta mengorganisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

1. Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan, dengan indikator yaitu :

- a. Animasi sosial, yaitu kemampuan Kepala Desa dalam memberikan motivasi pada kegiatan pembangunan pertanian.
 - b. Mediasi dan negosiasi, yaitu Kepala Desa dapat bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan pembangunan pertanian.
 - c. Pemberi dukungan, yaitu Kepala Desa memberikan dukungan pada setiap kegiatan pembangunan pertanian.
 - d. Fasilitasi kelompok, yaitu Kepala Desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan pertanian.
 - e. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, yaitu Kepala Desa memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang pertanian.
 - f. Mengorganisasi, yaitu Kepala Desa dapat merencanakan dan melaksanakan setiap kegiatan pembangunan pertanian.
2. Faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Sumber Data

1. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun informan pada penelitian ini yaitu :
 - a. Informan kunci yaitu Kepala Desa Sukamaju.
 - b. Informan yaitu terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Desa Sukamaju.
 - 2) Kepala Dusun I.
 - 3) Kepala Dusun II.
 - 4) Kepala Dusun III.
 - 5) Kepala Dusun IV.
 - c. Informan lain yaitu tokoh masyarakat di Desa Sukamaju yang berjumlah 2 orang.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain buku-buku ilmiah, kondisi desa, struktur organisasi, visi dan misi, program pemberdayaan serta fasilitas desa.

Teknik Pengumpulan Data

1. *Library Research* yaitu penulis menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. *Field Work Research* yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dari Milles dan Huberman terjemahan Rohidi (2009:20) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN

Pembahasan

Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang

Animasi Sosial

Menurut Rukminto (2008:17) animasi sosial merupakan kemampuan pelaku pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan Kepala Desa dalam memberikan motivasi pada kegiatan pembangunan pertanian masih kurang berhasil. Hal ini dikarenakan motivasi dalam bentuk penghargaan tidak pernah diberikan kepada petani maupun kelompok tani yang hasil pertaniannya meningkat

Motivasi mengacu kepada suatu proses mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap bermacam-macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. Motivasi mencakup di dalamnya arah atau tujuan tingkah laku, kekuatan respons, dan kegigihan tingkah laku. Di samping itu, istilah tersebut mencakup sejumlah konsep dorongan (*drive*), kebutuhan (*need*), rangsangan (*incentive*), ganjaran (*reward*), penguatan (*reinforcement*), ketetapan tujuan (*goal setting*), harapan (*expectancy*), dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam memberikan motivasi pada kegiatan pembangunan pertanian masih kurang berhasil untuk pemberdayaan masyarakat. Dimana motivasi dalam bentuk penghargaan tidak pernah diberikan kepada petani maupun kelompok tani yang hasil pertaniannya meningkat.

Mediasi dan Negoisasi

Menurut Rukminto (2008:17) mediasi dan negoisasi yaitu seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut. Peran sebagai mediator ini tentu saja terkait dengan peran sebagai negoisator karena di tengah kelompok yang sedang berkonflik, tidak jarang seorang pelaku perubahan harus mampu menengahi dan mencari titik temu yang dapat dikerjakan bersama oleh kelompok-kelompok yang sedang berkonflik tersebut tanpa menimbulkan pertentangan dan perpecahan yang lebih mendalam. Artinya seorang pemberdaya masyarakat tidak boleh memihak satu diantara kelompok masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kepala Desa dapat bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan pembangunan pertanian, dimana cara Kepala Desa Sukamaju dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu musyawarah dalam suatu forum, melakukan mediasi dan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Penjelasan mengenai mediasi akan dikemukakan secara *etimologi* dan *terminologi*. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjebatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang di tampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan *substantif* dan *procedural* kepada para pihak yang bersengketa.

Proses perundingan mediasi dikatakan ideal jika memenuhi 3 kepuasan, yaitu substantif, prosedural dan psikologis. Substantif artinya berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya ganti rugi. Prosedural artinya para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan gagasan selama berlangsungnya perundingan. Dan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak, saling menghargai dan sikap positif dari para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berhasil dalam bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan pembangunan pertanian untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan cara Kepala Desa Sukamaju dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu melalui musyawarah dalam suatu forum, melakukan mediasi dan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pemberi Dukungan

Menurut Rukminto (2008:17) salah satu peran dari pemberdaya masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut. Dukungan itu sendiri tidak selalu bersifat materiil, tetapi dapat juga bersifat seperti pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan dari pelaku perubahan terhadap apa yang dilakukan warga,

seperti menyediakan waktu bagi warga bila mereka ingin berbicara dengannya guna membahas permasalahan yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kepala Desa memberikan dukungan pada setiap kegiatan pembangunan pertanian di Desa Sukamaju, bentuk dukungan yang diberikan berupa pembuatan gorong-gorong jalan usaha tani dan pengerasan jalan usaha tani.

Dukungan adalah bantuan yang bermanfaat secara emosional dan memberikan pengaruh positif yang berupa informasi, bantuan instrumental, emosi, maupun penilaian. Klasifikasikan dukungan meliputi dukungan emosional, yaitu perasaan subjek bahwa lingkungan memperhatikan dan memahami kondisi emosional, dukungan penilaian yaitu perasaan subjek bahwa dirinya diakui oleh lingkungan mampu berguna bagi orang lain dan dihargai usaha-usahanya, dukungan instrumental yaitu perasaan subjek bahwa lingkungan sekitarnya memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, dukungan informatif yaitu perasaan subjek bahwa lingkungan memberikan keterangan yang cukup jelas mengenai hal-hal yang harus diketahuinya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berhasil dalam memberikan dukungan pada setiap kegiatan pembangunan pertanian di Desa Sukamaju. Dimana dukungan yang diberikan dalam bentuk pembuatan gorong-gorong jalan usaha tani dan pengerasan jalan usaha tani.

Fasilitasi Kelompok

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Kepala Desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan pertanian, dimana fasilitas yang diberikan berupa pengadaan saprodi gapoktan, pengadaan tanaman hijau keluarga PKK, pembuatan lumbung kelompok tani dan pengadaan hand traktor.

Menurut Rukminto (2008:17) keefektifan kerja dari pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat juga akan sangat terkait dengan keterampilannya untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat pada dasarnya merupakan suatu modal sosial karena adanya unsur norma (*norms*) dan nilai (*values*) dalam kelompok tersebut serta adanya kepercayaan yang merupakan suatu ciri modal sosial. Hal yang menjadi masalah adalah mampukah pelaku perubahan memfasilitasi kelompok-kelompok warga tersebut agar mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara lebih utuh dan bukan sekedar membangun satu atau dua kelompok saja. Dalam beberapa situasi, seorang pemberdaya masyarakat dapat melakukan peranan fasilitatif dalam kelompok. Dia bisa terlibat sebagai ketua kelompok atau sebagai anggota kelompok untuk membantu kelompok tersebut dalam mencapai tujuan secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berhasil dalam memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan pertanian berupa pengadaan saprodi gapoktan, pengadaan tanaman hijau keluarga PKK, pembuatan lumbung kelompok tani dan pengadaan hand traktor.

Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan

Menurut Rukminto (2008:17) pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada aspek pemanfaatan sumber daya dan keterampilan menunjukkan bahwa peran yang diberikan Kepala Desa dengan memberikan pelatihan kepada petani di Desa Sukamaju berupa pelatihan pencegahan bakteri tanam karet, dimana pelatihan tersebut hanya dilaksanakan pada Dusun I dan III sehingga tidak melingkupi seluruh petani di Desa Sukamaju serta tanpa memberikan pelatihan teknik panen yang baik untuk meningkatkan hasil pertanian. Sehingga pelatihan yang diberikan kepada petani kurang dapat meningkatkan keterampilan dalam bidang pertanian.

Pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan juga merupakan proses membantu pegawai/karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan keterampilan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil pertanian. Akan tetapi pelatihan yang diberikan masih kurang berhasil, hal ini dikarenakan pelatihan hanya dilaksanakan pada Dusun I dan III dan tidak melingkupi seluruh petani di Desa Sukamaju.

Mengorganisasi

Menurut Rukminto (2008:17) peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yang terkait dengan peran-peran fasilitatif adalah sebagai organisator. Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengorganisasian yaitu Kepala Desa selalu merencanakan dan melaksanakan setiap kegiatan pembangunan pertanian, yang mana perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Desa Sukamaju berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan

dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan pertanian, yang mana perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Desa Sukamaju berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang, diketahui faktor pendukung yaitu kondisi atau lingkungan yang baik dan faktor penghambat yaitu kurangnya keterampilan masyarakat.

1. Kondisi Kerja

Menurut Rachmawati (2008:1) yang dimaksud dengan kondisi atau lingkungan adalah kondisi yang dapat dipersiapkan oleh organisasi yang bersangkutan pada organisasi yang didirikan oleh pemerintah. Kondisi atau lingkungan yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah suasana yang dapat mendorong seorang untuk mengaktualisasikan potensinya dan menampilkan pekerjaannya secara baik. Agar kondisi tersebut dapat terwujud, maka suasana kooperatif dan kolaboratif harus diciptakan.

Dari hasil analisis penulis terhadap uraian sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa kondisi atau lingkungan seperti tersebut termasuk di Desa Sukamaju. Masyarakat seringkali terlibat dialog santai antara Kepala Desa kepada masyarakat menyebabkan hubungan menjadi lebih akrab, dan tidak terlihat adanya penghalang dalam melakukan percakapan.

2. Keterampilan

Menurut Robbins (2006:494) pengertian ketrampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka salah faktor penunjang adalah tingkat keterampilan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat keterampilan seorang, maka akan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui keterampilan masyarakat dalam bidang pertanian masih belum optimal. Sebuah organisasi akan lebih berkembang bila memiliki masyarakat yang terampil dan memiliki etos kerja tinggi. Seorang pimpinan harus bisa meningkatkan keterampilan masyarakat agar yang diharapkan dalam organisasi bisa tercapai.

Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui upaya penanggulangan kemiskinan sangat kompleks dan rumit. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung

akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dapat berjalan seperti apa yang sudah dicita-citakan. Permasalahan mendasar dalam keberdayaan masyarakat khususnya petani yaitu yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tahap dalam upaya meningkatkan kemandirian, hasil panen dan kesejahteraan masyarakat dalam hidupnya. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan informasi dan hasil kajian yang dilakukan bersama oleh masyarakat bersama tim fasilitator, untuk mengembangkan rencana kerja masyarakat petani agar lebih maju dan mandiri. Dimana ukuran keberhasilannya adalah kemajuan fisik atau luasan tanaman. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lahan pertanian menjadi sangat penting, karena walaupun telah ada peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat akan tetapi tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka tingkat keberhasilan pembangunan usaha pertanian sangat rendah dan sekaligus masyarakat tetap miskin atau malah menjadi tambah miskin.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang :
 - a. Animasi sosial, kemampuan pemerintah desa dalam memberikan motivasi pada kegiatan pembangunan pertanian masih kurang berhasil untuk pemberdayaan masyarakat, dimana motivasi dalam bentuk penghargaan tidak pernah diberikan kepada petani maupun kelompok tani yang hasil pertaniannya meningkat.
 - b. Mediasi dan negosiasi, pemerintah desa berhasil dalam bertindak sebagai mediator antara kelompok atau individu yang konflik pada kegiatan pembangunan pertanian untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan cara Kepala Desa Sukamaju dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu melalui musyawarah dalam suatu forum, melakukan mediasi dan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.
 - c. Pemberi dukungan, pemerintah desa berhasil dalam memberikan dukungan pada setiap kegiatan pembangunan pertanian di Desa Sukamaju. Dimana dukungan yang diberikan dalam bentuk pembuatan gorong-gorong jalan usaha tani dan pengerasan jalan usaha tani.
 - d. Fasilitasi kelompok, pemerintah desa berhasil dalam memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan pertanian berupa pengadaan saprodi gapoktan, pengadaan tanaman hijau keluarga PKK, pembuatan lumbung kelompok tani dan pengadaan hand traktor.

- e. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan, pemerintah desa memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan keterampilan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil pertanian. Akan tetapi pelatihan yang diberikan masih kurang berhasil, hal ini dikarenakan pelatihan hanya dilaksanakan pada Dusun I dan III dan tidak melingkupi seluruh petani di Desa Sukamaju.
 - f. Mengorganisasi, pemerintah desa telah melakukan perencanaan dan pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan pertanian, yang mana perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Desa Sukamaju berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).
2. Faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggara Seberang, diketahui faktor pendukung yaitu kondisi atau lingkungan yang baik dan faktor penghambat yaitu kurangnya keterampilan masyarakat.

Saran

1. Diharapkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk memberikan tanggapan atau masukan kepada pemerintah desa terhadap kebijakan yang telah diberikan pada program pertanian di Desa Sukamaju, karena dengan adanya tanggapan masyarakat, maka pemerintah desa dapat mengevaluasi dalam memberdayakan masyarakat khususnya pada bidang pertanian.
2. Diharapkan peningkatan kerjasama antara kelompok petani di Desa Sukamaju untuk saling mendukung dalam meningkatkan hasil pertanian, seperti berbagi informasi cara bertani yang benar.
3. Diharapkan adanya peningkatan sosialisasi pada program pemberdayaan masyarakat khususnya bidang pertanian, untuk menghindari kegagalan pada setiap program yang sudah dirancang pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadisaputro, S. 2008. *Badan Usaha Unit Desa Dan Masalah Pembinaannya*. Jurnal Prisma Volume 4.
- Kartasasmita. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Makalah Sarasehan DPD Golkar. Surabaya.
- Koentjaraningrat. 2009. *Kebudayaan, Mentalis dan pembangunan*. Gramedia. Jakarta.
- Mardikanto, T dan Poerwoko S. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Moleong, L. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Priyono K.D. 2006. *Anthony Giddens : Suatu Pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.

Rachmawati, Ike Kusdayah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. ANDI. Yogyakarta.

Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. PT. Indeks. Jakarta.

Rohidi, T.R. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Rukminto, A.I. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju. Bandung.

Soedijanto. 2010. *Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Dalam Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis*. Departemen Pertanian. Jakarta.

Suwondo, C. 2008. *Outsourcing Implementasi di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Dokumen-dokumen :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.